



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,






Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023.

Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6397);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 10 Tahun 2017, tentang Hak Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Perangkat Desa dan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2017 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2022 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor);
9. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2019 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :



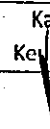

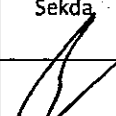
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2023.

BAB I



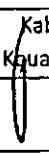

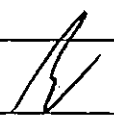
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
- (2) Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
- (3) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

- (4) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Camat adalah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan.
- (6) Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
- (7) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (8) Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- (9) Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa.
- (10) Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- (11) Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri atas sekretarias desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
- (12) Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- (13) Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- (14) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (15) Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah.

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

BAB II
PENGANGGARAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2






- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi masing masing Desa dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Tunjangan Lainnya;
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (4) Dalam hal terdapat kurang bayar dan/atau lebih ADD, maka kekurangan dan/atau kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dalam penyaluran ADD tahun anggaran berikutnya.
- (5) Kurang bayar dan/atau lebih bayar ADD diperoleh setelah diterima laporan audit keuangan oleh instansi yang berwenang.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan alokasi pagu dana perimbangan maka Alokasi Dana Desa akan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah sesuai ketentuan Perundang-Undangan.

BAB III
PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

Pengalokasian ADD mempertimbangkan :

- a. jumlah penduduk;
- b. luas wilayah Desa;
- c. angka kemiskinan; dan
- d. tingkat kesulitan geografis.

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

Pasal 4

Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Paragraf 1

Ruang Lingkup Transfer Alokasi Dana Desa

Pasal 5

- (1) Alokasi Dana Desa ditransfer melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa setiap bulan.
- (2) Alokasi Dana Desa ditransfer setiap bulan atau 1/12 (satu per dua belas) dari Alokasi Dana Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran dan khusus biaya operasional pemerintahan desa di transfer per triwulan.
- (3) Pelaksanaan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disalurkan lebih dari alokasi untuk 1 (satu) bulan bersamaan setelah persyaratan transfer terpenuhi.

Pasal 6






Rekening Kas Desa tidak diperkenankan menggunakan lebih dari satu rekening giro kecuali ditentukan lain dalam peraturan ini.

Paragraf 2

Pelaksanaan Transfer Alokasi Dana Desa

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Transfer Alokasi Dana Desa ke Rekening Kas Desa, Kepala Badan Keuangan Daerah Selaku PPKD menerbitkan Surat Perintah membayar (SPM) sebagai perintah pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah dan/atau kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (3) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bendahara Umum Daerah dan/atau Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan





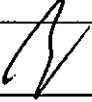
Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

SP2D yang dilampiri nomor Rekening Kas Desa sebagai penerima bantuan keuangan kepada pemerintah desa.

- (4) Tata cara penerbitan SPM dan SP2D dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Transfer Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dilakukan berdasarkan surat rekomendasi transfer Alokasi Dana Desa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Pemberian surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
- a. Untuk transfer bulan pertama pada awal tahun anggaran dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang terdiri dari :
1. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2023 beserta lampiran;
 2. Fotocopy Keputusan Camat tentang hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa APB Desa Tahun 2023 beserta hasil verifikasi Tim Asistensi Kecamatan;
 3. Fotocopy Surat Keputusan Jabatan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa;
 4. Fotocopy Surat Keputusan Jabatan Perangkat Desa;
 5. Fotocopy Rekening Giro Kas Desa; dan
 6. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Kepala Urusan Keuangan Desa.
- b. untuk transfer bulan selanjutnya dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang terdiri dari :
1. Lembar konfirmasi atas dana transfer bulan sebelumnya yang telah diverifikasi oleh Tim Asistensi Kecamatan;
 2. Surat Pernyataan Penggunaan Dana Transfer yang telah diverifikasi oleh Tim Asistensi Kecamatan.
 3. Laporan Realisasi APBD Desa Triwulan, Laporan Semesteran dan Laporan Akhir Tahun.
- c. Khusus transfer setelah Perubahan APBDes Tahun 2023, Kepala Desa menyampaikan dokumen kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang terdiri dari :

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

1. Perdes Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023 beserta lampirannya.
 2. Keputusan Camat tentang hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes Tahun 2023.
- (3) Khusus untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat langsung ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa oleh Bendahara Umum Daerah setiap bulan paling lambat minggu kedua bulan berjalan, kecuali tunjangan, honor/insentif dan operasional Pemerintahan Desa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat menunda penerbitan surat rekomendasi transfer Alokasi Dana Desa jika Kepala Desa belum memenuhi kewajiban laporan realisasi anggaran setiap triwulan dan laporan lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (5) Penundaan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga atas kewajiban laporan atas Dana Desa (APBN).

BAB V

PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 9

- (1) ADD Tahun Anggaran 2023 digunakan untuk:
- a. kegiatan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
 1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 2. tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 3. tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
 4. tunjangan kesejahteraan;
 5. tunjangan kinerja; dan
 6. operasional Pemerintahan Desa.
 - b. kegiatan bidang pembangunan desa;
Kegiatan pembangunan desa Kegiatan Sesuai Kewenangan berskala Lokal Desa dan sesuai kesepakatan musyawarah Desa.
 - c. kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan;
Kegiatan pembinaan kemasyarakatan sesuai kewenangan desa yang disepakati dalam musyawarah desa.
 - d. kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat; dan

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kabid Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	

Kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Kewenangan berskala lokal desa dan sesuai kesepakatan musyawarah desa.

- e. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak desa.
- (2) Dalam penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah desa agar mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa yang telah disepakati melalui musyawarah Desa dengan berpedoman pada kebijakan Pemerintah.
- (3) Penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam APB Desa menggunakan presentase sebagai berikut:
- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa, bidang pelaksanaan pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan Desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa serta bidang belanja tak terduga.
- b. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk :
- a. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, dan;
- b. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 10






Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf 1, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PERTANGGUNG JAWABAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 11

- (1) Pencairan Alokasi Dana Desa oleh Kepala Desa, dengan ketentuan :

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kabag Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

- a. Pencairan Alokasi Dana Desa dilaksanakan melalui rekening Kas Desa;
 - b. Pencairan Alokasi Dana Desa harus berdasarkan dan berpedoman pada Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
 - c. Pencairan Alokasi Dana Desa harus melalui mekanisme yang diatur sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Setiap transaksi yang terjadi, baik itu penerimaan maupun pengeluaran kas harus dicatat dan dibukukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12






- (1) Selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2023, seluruh penggunaan Alokasi Dana Desa telah dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.
- (2) Apabila terdapat saldo pada saat dilakukan pertanggungjawaban keuangan desa, maka menjadi Silpa pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VII

PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Camat, serta Pengawasan Internal dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara.
- (2) Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dalam melaksanakan fungsi pembinaan, monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kabupaten, Tim Asistensi Kabupaten dan Tim Asistensi Kecamatan.
- (3) Jika ditemukan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa, maka Camat dan Inspektorat Daerah dapat meminta kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk dilakukan Penundaan penerbitan surat rekomendasi transfer Alokasi Dana Desa pada Desa yang bersangkutan secara tertulis.

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

- (4) Apabila ditemukan adanya bukti penyalahgunaan Alokasi Dana Desa, maka pengelola keuangan desa dan pihak terlibat dapat dituntut dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkewajiban mengganti Alokasi Dana Desa yang disalahgunakan.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang

Pada tanggal, 29 Desember 2022

BUPATI GORONTALO UTARA,

THARIQ MODANGGU






Diundangkan di Kwandang

Pada tanggal, 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

SULEMAN LAKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2022 NOMOR..522

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kabag Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR : 34 TAHUN 2022

TANGGAL : 29 DESEMBER 2022

TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2023

NO	KODE	URAIAN/KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7
I	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA					
	1.1	Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat				29,505,515,760
	1.1.1	Kepala Desa	123	12 Bulan	2,426,640	3,581,720,640
	1.1.2	Sekretaris Desa	123	12 Bulan	2,224,420	3,283,243,920
	1.1.3	Kepala Urusan	246	12 Bulan	2,022,200	5,969,534,400
	1.1.4	Kepala Seksi	246	12 Bulan	2,022,200	5,969,534,400
	1.1.5	Kepala Dusun	441	12 Bulan	2,022,200	10,701,482,400
	1.2	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa				2,214,000,000
	1.2.1	Kepala Desa	123	12 Bulan	1,500,000	2,214,000,000
	1.3	Tunjangan Kedudukan BPD				3,570,528,000
	1.3.1	Ketua BPD	123	12 Bulan	520,000	767,520,000
	1.3.2	Wakil Ketua BPD/Sekretaris	246	12 Bulan	468,000	1,381,536,000
	1.3.3	Anggota BPD	268	12 Bulan	442,000	1,421,472,000
	1.4	Tunjangan Kinerja BPD				2,677,896,000
	1.4.1	Ketua BPD	123	12 Bulan	390,000	575,640,000
	1.4.2	Wakil Ketua BPD/Sekretaris	246	12 Bulan	351,000	1,036,152,000
	1.4.3	Anggota BPD	268	12 Bulan	331,500	1,066,104,000
	1.5	Operasional Pemerintahan Desa/Lembaga Desa				3,032,060,240
	1.5.1	Operasional Pemerintah Desa	123	1 Paket	5,000,000	615,000,000
	1.5.3	Operasional BPD	123	1 Paket	4,050,896	498,260,208
	1.5.4	Staf BPD	123	12 Bulan	1,000,000	1,476,000,000
	1.5.4	Bimtek BPD	123	1 Tahun	3,600,000	442,800,000
	1.5.4	Pembulatan				32
		TOTAL				41,000,000,000

BUPATI GORONTALO UTARA

THARIQ MODANGGU

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR : 34 TAHUN 2022

TANGGAL : 29 DESEMBER 2022

TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PENDAPATAN TRANSFER ADD	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA						
				Penghasilan Tetap dan Tunjangan						
				SILTAP KADES	SEKDES	KAUR	SEKSI	JLH DSN	KADUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	ATINGGOLA		4,730,052,224	407,675,520	373,702,560	679,459,200	679,459,200		53	1,286,119,200
1		IMANA	384,565,216	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800		5	121,332,000
2		BINTANA	317,468,416	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800		3	72,799,200
3		BUATA	317,468,416	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800		3	72,799,200
4		PINONTROYONGA	366,001,216	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800		5	121,332,000
5		MONGGUPO	341,734,816	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800		4	97,065,600
6		KOTAJIN	390,267,616	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800		0	145,598,400
7		ILOMATA	341,734,816	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800		4	97,065,600
8		ILOHELUMA	317,468,416	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800		3	72,799,200
9		WAPALO	317,468,416	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800		3	72,799,200
10		POSONO	317,468,416	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800		3	72,799,200
11		SIGASO	317,468,416	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800		3	72,799,200
12		TOMBULILATO	341,734,816	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800		4	97,065,600
13		KOTAJIN UTARA	341,734,816	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800		4	97,065,600
14		OLUHUTA	317,468,416	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800		3	72,799,200

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR : 34 TAHUN 2022
 TANGGAL : 29 DESEMBER 2022
 TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA										
			Tunjangan Jabatan	Tunjangan Kinerja					Tunjangan Kedudukan BPD				
			Tunjangan Jabatan Kades	KETUA BPD	WAKIL KETUA BPD	SEKRETARIS BPD	JLH ANG BPD	ANGGOTA BPD	KETUA BPD	WAKIL KETUA BPD	SEKRETARIS BPD	ANGGOTA BPD	JLH ANG BPD
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I	ATINGGOLA		252,000,000	65,520,000	58,968,000	58,968,000	30	119,340,000	87,360,000	78,624,000	78,624,000	159,120,000	30
1		IMANA	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	4	15,912,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	21,216,000	4
2		BINTANA	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
3		BUATA	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
4		PINONTROYONGA	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
5		MONGGUPO	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
6		KOTAJIN	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
7		ILOMATA	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
8		ILOHELUMA	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
9		WAPALO	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
10		POSONO	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
11		SIGASO	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
12		TOMBULILATO	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
13		KOTAJIN UTARA	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
14		OLUHUTA	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR : 34 TAHUN 2022
 TANGGAL : 29 DESEMBER 2022
 TENTANG : TATA CARA PENGALO

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	TOTAL SILTAP, TUNJANGAN DAN TUNJANGAN BPD	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA				STAF BPD	TOTAL BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (PAGU ADD PER DESA)
				Operasional Pemerintahan Desa			JUMLAH BIAYA OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA		
				Pemerintah Desa	BPD	BIMTEK BPD			
1	2	3	23	24	26	29	28	35	42
1	ATINGGOLA		4,384,939,680	70,000,000	56,712,544	50,400,000	177,112,544	168,000,000	4,730,052,224
1		IMANA	359,914,320	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	384,565,216
2		BINTANA	292,817,520	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	317,468,416
3		BUATA	292,817,520	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	317,468,416
4		PINONTOYONGA	341,350,320	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	366,001,216
5		MONGGUPO	317,083,920	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	341,734,816
6		KOTAJIN	365,616,720	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	390,267,616
7		ILOMATA	317,083,920	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	341,734,816
8		ILOHELUMA	292,817,520	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	317,468,416
9		WAPALO	292,817,520	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	317,468,416
10		POSONO	292,817,520	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	317,468,416
11		SIGASO	292,817,520	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	317,468,416
12		TOMBULILATO	317,083,920	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	341,734,816
13		KOTAJIN UTARA	317,083,920	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	341,734,816
14		OLUHUTA	292,817,520	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	317,468,416

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kapan Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PENDAPATAN TRANSFER ADD	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA					
				Penghasilan Tetap dan Tunjangan					
				SILTAP KADES	SEKDES	KAUR	SEKSI	JLH DSN	KADUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	KWANDANG		6,262,610,688	524,154,240	480,474,720	873,590,400	873,590,400	72	1,747,180,800
1		PONTOLO	341,734,816	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	4	97,065,600
2		MOLINGGAPOTO	341,734,816	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	4	97,065,600
3		LEBOTO	360,298,816	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	4	97,065,600
4		POSSO	360,298,816	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	4	97,065,600
5		TITIDU	384,565,216	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	5	121,332,000
6		MOLUO	336,032,416	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
7		MOOTINELO	317,468,416	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
8		BUALEMO	341,734,816	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	4	97,065,600
9		BULALO	457,364,416	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	8	194,131,200
10		KATIALADA	360,298,816	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	4	97,065,600
11		OMBULODATA	341,734,816	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	4	97,065,600
12		ALATA KARYA	341,734,816	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	4	97,065,600
13		CISADANE	317,468,416	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
14		BOTUWOMBATO	317,468,416	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
15		BOTUNGOBUNGO	341,734,816	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	4	97,065,600
16		MOLNGK. SELATAN	341,734,816	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	4	97,065,600
17		PONTOLO ATAS	317,468,416	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati






NO	KECAMATAN	NAMA DESA	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA										
			Tunjangan Jabatan	Tunjangan Kinerja					Tunjangan Kedudukan BPD				
			Tunjangan Jabatan Kades	KETUA BPD	WAKIL KETUA BPD	SEKRETARIS BPD	JLH ANG BPD	ANGGOTA BPD	KETUA BPD	WAKIL KETUA BPD	SEKRETARIS BPD	ANGGOTA BPD	JLH ANG BPD
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
II	KWANDANG		324,000,000	84,240,000	75,816,000	75,816,000	48	190,944,000	112,320,000	101,088,000	101,088,000	254,592,000	48
1		PONTOLO	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
2		MOLINGGAPOTO	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
3		LEBOTO	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	4	15,912,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	21,216,000	4
4		POSSO	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	4	15,912,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	21,216,000	4
5		TITIDU	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	4	15,912,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	21,216,000	4
6		MOLUO	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	4	15,912,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	21,216,000	4
7		MOOTINELO	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
8		BUALEMO	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
9		BULALO	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	4	15,912,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	21,216,000	4
10		KATIALADA	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	4	15,912,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	21,216,000	4
11		OMBULODATA	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
12		ALATA KARYA	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
13		CISADANE	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
14		BOTUWOMBATO	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
15		BOTUNGOBUNGO	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
16		MOLNGK. SELATAN	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
17		PONTOLO ATAS	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
<i>u</i>	<i>g</i>	<i>l</i>	<i>q</i>	<i>ll</i>	

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	TOTAL SILTAP, TUNJANGAN DAN TUNJANGAN BPD	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			STAF BPD	TOTAL BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (PAGU ADD PER DESA)	
				Operasional Pemerintahan Desa					JUMLAH BIAYA OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA
				Pemerintah Desa	BPD	BIMTEK BPD			
1	2	3	23	24	26	29	28	35	42
II	KWANDANG		5,818,894,560	90,000,000	72,916,128	64,800,000	227,716,128	216,000,000	6,262,610,688
1		PONTOLO	317,083,920	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	341,734,816
2		MOLINGGAPOTO	317,083,920	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	341,734,816
3		LEBOTO	335,647,920	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	360,298,816
4		POSSO	335,647,920	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	360,298,816
5		TITIDU	359,914,320	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	384,565,216
6		MOLUO	311,381,520	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	336,032,416
7		MOOTINELO	292,817,520	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	317,468,416
8		BUALEMO	317,083,920	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	341,734,816
9		BULALO	432,713,520	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	457,364,416
10		KATIALADA	335,647,920	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	360,298,816
11		OMBULODATA	317,083,920	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	341,734,816
12		ALATA KARYA	317,083,920	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	341,734,816
13		CISADANE	292,817,520	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	317,468,416
14		BOTUWOMBATO	292,817,520	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	317,468,416
15		BOTUNGOBUNGO	317,083,920	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	341,734,816
16		MOLNGK. SELATAN	317,083,920	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	341,734,816
17		PONTOLO ATAS	292,817,520	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	317,468,416

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PENDAPATAN TRANSFER ADD	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA					
				Penghasilan Tetap dan Tunjangan					
				SILTAP KADES	SEKDES	KAUR	SEKSI	JLH DSN	KADUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18		MASURU	341,734,816	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	4	97,065,600
III	ANGGREK		5,357,281,440	436,795,200	400,395,600	727,992,000	727,992,000	68	1,650,115,200
1		ILANGATA	433,098,016	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	7	169,864,800
2		TOLONGIO	366,001,216	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	5	121,332,000
3		TOLANGO	360,298,816	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	4	97,065,600
4		POPALO	366,001,216	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	5	121,332,000
5		DUDEPO	390,267,616	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	6	145,598,400
6		MOOTILANGO	341,734,816	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	4	97,065,600
7		LANGGE	317,468,416	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
8		TUTUWOTO	317,468,416	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
9		HIYALOOILE	341,734,816	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	4	97,065,600
10		IBARAT	414,534,016	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	7	169,864,800
11		ILOHELUMA	341,734,816	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	4	97,065,600
12		ILODULUNGA	341,734,816	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	4	97,065,600
13		PUTIANA	366,001,216	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	5	121,332,000
14		HELUMO	341,734,816	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	4	97,065,600
15		DATAHU	317,468,416	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekja	Wakil Bupati
					






NO	KECAMATAN	NAMA DESA	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA										
			Tunjangan Jabatan	Tunjangan Kinerja					Tunjangan Kedudukan BPD				
			Tunjangan Jabatan Kades	KETUA BPD	WAKIL KETUA BPD	SEKRETARIS BPD	JLH ANG BPD	ANGGOTA BPD	KETUA BPD	WAKIL KETUA BPD	SEKRETARIS BPD	ANGGOTA BPD	JLH ANG BPD
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
18		MASURU	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
III	ANGGREK		270,000,000	70,200,000	63,180,000	63,180,000	34	135,252,000	93,600,000	84,240,000	84,240,000	180,336,000	34
1		ILANGATA	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	4	15,912,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	21,216,000	4
2		TOLONGIO	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
3		TOLANGO	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	4	15,912,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	21,216,000	4
4		POPALO	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
5		DUDEPO	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
6		MOOTILANGO	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
7		LANGGE	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
8		TUTUWOTO	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
9		HIYALOOILE	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
10		IBARAT	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
11		ILOHELUMA	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
12		ILODULUNGA	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
13		PUTIANA	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
14		HELUMO	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
15		DATAHU	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	TOTAL SILTAP, TUNJANGAN DAN TUNJANGAN BPD	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			STAF BPD	TOTAL BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (PAGU ADD PER DESA)	
				Operasional Pemerintahan Desa					JUMLAH BIAYA OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA
				Pemerintah Desa	BPD	BIMTEK BPD			
1	2	3	23	24	26	29	28	35	42
18		MASURU	317,083,920	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	341,734,816
III	ANGGREK		4,987,518,000	75,000,000	60,763,440	54,000,000	189,763,440	180,000,000	5,357,281,440
1		ILANGATA	408,447,120	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	433,098,016
2		TOLONGIO	341,350,320	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	366,001,216
3		TOLANGO	335,647,920	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	360,298,816
4		POPALO	341,350,320	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	366,001,216
5		DUDEPO	365,616,720	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	390,267,616
6		MOOTILANGO	317,083,920	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	341,734,816
7		LANGGE	292,817,520	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	317,468,416
8		TUTUWOTO	292,817,520	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	317,468,416
9		HIYALOOILE	317,083,920	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	341,734,816
10		IBARAT	389,883,120	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	414,534,016
11		ILOHELUMA	317,083,920	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	341,734,816
12		ILODULUNGA	317,083,920	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	341,734,816
13		PUTIANA	341,350,320	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	366,001,216
14		HELUMO	317,083,920	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	341,734,816
15		DATAHU	292,817,520	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	317,468,416

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati






NO	KECAMATAN	NAMA DESA	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA						
			PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN						
			ADD	SILTAP KADES	SEKDES	KAUR	SEKSI	JLH DSN	KADUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV	SUMALATA		3,650,612,576	320,316,480	293,623,440	533,860,800	533,860,800	38	922,123,200
1		BULONTIO TIMUR	384,565,216	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	5	121,332,000
2		BULONTIO BARAT	336,032,416	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
3		BULOILA	317,468,416	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
4		KASIA	317,468,416	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
5		KIKIA	317,468,416	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
6		TUMBA	341,734,816	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	4	97,065,600
7		MEBONGO	317,468,416	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
8		LELATO	341,734,816	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	4	97,065,600
9		PULOHENTI	317,468,416	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
10		PUNCAK MANDIRI	317,468,416	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
11		HUTAKALO	341,734,816	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	4	97,065,600

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					






NO	KECAMATAN	NAMA DESA	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA										
			Tunjangan Jabatan	Tunjangan Kinerja					Tunjangan Kedudukan BPD				
			Tunjangan Jabatan Kades	KETUA BPD	WAKIL KETUA BPD	SEKRETARIS BPD	JLH ANG BPD	ANGGOTA BPD	KETUA BPD	WAKIL KETUA BPD	SEKRETARIS BPD	ANGGOTA BPD	JLH ANG BPD
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
IV	SUMALATA		198,000,000	51,480,000	46,332,000	46,332,000	26	103,428,000	68,640,000	61,776,000	61,776,000	137,904,000	26
1		BULONTIO TIMUR	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	4	15,912,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	21,216,000	4
2		BULONTIO BARAT	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	4	15,912,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	21,216,000	4
3		BULOILA	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
4		KASIA	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
5		KIKIA	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
6		TUMBA	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
7		MEBONGO	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
8		LELATO	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
9		PULOHENTI	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
10		PUNCAK MANDIRI	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
11		HUTAKALO	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati

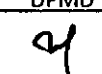
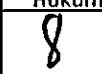

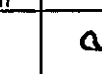
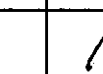
NO	KECAMATAN	NAMA DESA	TOTAL SILTAP, TUNJANGAN DAN TUNJANGAN BPD	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			STAF BPD	TOTAL BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (PAGU ADD PER DESA)	
				Operasional Pemerintahan Desa					JUMLAH BIAYA OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA
				Pemerintah Desa	BPD	BIMTEK BPD			
1	2	3	23	24	26	29	28	35	42
IV	SUMALATA		3,379,452,720	55,000,000	44,559,856	39,600,000	139,159,856	132,000,000	3,650,612,576
1		BULONTIO TIMUR	359,914,320	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	384,565,216
2		BULONTIO BARAT	311,381,520	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	336,032,416
3		BULOILA	292,817,520	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	317,468,416
4		KASIA	292,817,520	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	317,468,416
5		KIKIA	292,817,520	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	317,468,416
6		TUMBA	317,083,920	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	341,734,816
7		MEBONGO	292,817,520	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	317,468,416
8		LELATO	317,083,920	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	341,734,816
9		PULOHENTI	292,817,520	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	317,468,416
10		PUNCAK MANDIRI	292,817,520	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	317,468,416
11		HUTAKALO	317,083,920	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	341,734,816

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					






NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PENDAPATAN TRANSFER						
			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA						
			ADD	Penghasilan Tetap dan Tunjangan					
SILTAP KADES	SEKDES	KAUR		SEKSI	JLH DSN	KADUS			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V	TOLINGGULA		3,271,749,760	291,196,800	266,930,400	485,328,000	485,328,000	34	825,057,600
1		TOLINGGULA TENGAH	341,734,816	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	4	97,065,600
2		TOLINGGULA PANTAI	366,001,216	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	5	121,332,000
3		TOLINGGULA ULU	341,734,816	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	4	97,065,600
4		LIMBATO	293,202,016	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	2	48,532,800
5		PAPULANGI	341,734,816	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	4	97,065,600
6		MOLANGGA	317,468,416	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
7		CEMPAKA PUTIH	293,202,016	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	2	48,532,800
8		TOLITE JAYA	341,734,816	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	4	97,065,600
9		ILOMANGGA	293,202,016	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	2	48,532,800
10		ILOTUNGGULO	341,734,816	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	4	97,065,600

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kabag Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					






NO	KECAMATAN	NAMA DESA	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA										
			Tunjangan Jabatan	Tunjangan Kinerja					Tunjangan Kedudukan BPD				
			Tunjangan Jabatan Kades	KETUA BPD	WAKIL KETUA BPD	SEKRETARIS BPD	JLH ANG BPD	ANGGOTA BPD	KETUA BPD	WAKIL KETUA BPD	SEKRETARIS BPD	ANGGOTA BPD	JLH ANG BPD
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
V	TOLINGGULA		180,000,000	46,800,000	42,120,000	42,120,000	20	79,560,000	62,400,000	56,160,000	56,160,000	106,080,000	20
1		TOLINGGULA TENGAH	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
2		TOLINGGULA PANTAI	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
3		TOLINGGULA ULU	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
4		LIMBATO	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
5		PAPULANGI	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
6		MOLANGGA	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
7		CEMPAKA PUTIH	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
8		TOLITE JAYA	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
9		ILOMANGGA	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
10		ILOTUNGGULO	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,958,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					






NO	KECAMATAN	NAMA DESA	TOTAL SILTAP, TUNJANGAN DAN TUNJANGAN BPD	BIDANG PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DESA			STAF BPD	TOTAL BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (PAGU ADD PER DESA)	
				Operasional Pemerintahan Desa					JUMLAH BIAYA OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA
				Pemerintah Desa	BPD	BIMTEK BPD			
1	2	3	23	24	26	29	28	35	42
V	TOLINGGULA		3,025,240,800	50,000,000	40,508,960	36,000,000	126,508,960	120,000,000	3,271,749,760
1		TOLINGGULA TENGAH	317,083,920	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	341,734,816
2		TOLINGGULA PANTAI	341,350,320	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	366,001,216
3		TOLINGGULA ULU	317,083,920	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	341,734,816
4		LIMBATO	268,551,120	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	293,202,016
5		PAPULANGI	317,083,920	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	341,734,816
6		MOLANGGA	292,817,520	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	317,468,416
7		CEMPAKA PUTIH	268,551,120	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	293,202,016
8		TOLITE JAYA	317,083,920	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	341,734,816
9		ILOMANGGA	268,551,120	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	293,202,016
10		ILOTUNGGULO	317,083,920	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	341,734,816

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					






NO	KECAMATAN	NAMA DESA	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA						
			PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN						
			ADD	SILTAP KADES	SEKDES	KAUR	SEKSI	JLH DSN	KADUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI	GENTUMA RAYA		3,516,418,976	320,316,480	293,623,440	533,860,800	533,860,800	34	825,057,600
1		GENTUMA	317,468,416	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
2		DUMOLODO	341,734,816	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	4	97,065,600
3		MOLONGGOTA	317,468,416	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
4		IPILO	317,468,416	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
5		LANGKE	293,202,016	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	2	48,532,800
6		PASALAE	341,734,816	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	4	97,065,600
7		NANATI JAYA	317,468,416	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
8		KETAPANG	317,468,416	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
9		MOTOMINGO	317,468,416	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
10		DURIAN	317,468,416	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
11		BOHUSAMI	317,468,416	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					






NO	KECAMATAN	NAMA DESA	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA										
			Tunjangan Jabatan	Tunjangan Kinerja					Tunjangan Kedudukan BPD				
			Tunjangan Jabatan Kades	KETUA BPD	WAKIL KETUA BPD	SEKRETARIS BPD	JLH ANG BPD	ANGGOTA BPD	KETUA BPD	WAKIL KETUA BPD	SEKRETARIS BPD	ANGGOTA BPD	JLH ANG BPD
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
VI	GENTUMA RAYA		198,000,000	51,480,000	46,332,000	46,332,000	22	87,516,000	68,640,000	61,776,000	61,776,000	116,688,000	22
1		GENTUMA	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
2		DUMOLODO	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
3		MOLONGGOTA	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
4		IPILO	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
5		LANGKE	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
6		PASALAE	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
7		NANATI JAYA	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
8		KETAPANG	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
9		MOTOMINGO	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
10		DURIAN	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
11		BOHUSAMI	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					






NO	KECAMATAN	NAMA DESA	TOTAL SILTAP, TUNJANGAN DAN TUNJANGAN BPD	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			STAF BPD	TOTAL BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (PAGU ADD PER DESA)	
				Operasional Pemerintahan Desa					JUMLAH BIAYA OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA
				Pemerintah Desa	BPD	BIMTEK BPD			
1	2	3	23	24	26	29	28	35	42
VI	GENTUMA RAYA		3,245,259,120	55,000,000	44,559,856	39,600,000	139,159,856	132,000,000	3,516,418,976
1		GENTUMA	292,817,520	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	317,468,416
2		DUMOLODO	317,083,920	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	341,734,816
3		MOLONGGOTA	292,817,520	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	317,468,416
4		IPILO	292,817,520	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	317,468,416
5		LANGKE	268,551,120	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	293,202,016
6		PASALAE	317,083,920	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	341,734,816
7		NANATI JAYA	292,817,520	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	317,468,416
8		KETAPANG	292,817,520	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	317,468,416
9		MOTOMINGO	292,817,520	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	317,468,416
10		DURIAN	292,817,520	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	317,468,416
11		BOHUSAMI	292,817,520	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	317,468,416

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					






NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PENDAPATAN TRANSFER	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA					
			ADD	Penghasilan Tetap dan Tunjangan					
				SILTAP KADES	SEKDES	KAUR	SEKSI	JLH DSN	KADUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII	TOMILITO		3,344,548,960	291,196,800	266,930,400	485,328,000	485,328,000	37	897,856,800
1		DAMBALO	366,001,216	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	5	121,332,000
2		MILANGO	317,468,416	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
3		JEMBATAN MERAH	341,734,816	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	4	97,065,600
4		BUBODE	341,734,816	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	4	97,065,600
5		LEYAO	317,468,416	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
6		MOLANTADU	341,734,816	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	4	97,065,600
7		HUIDU MELITO	341,734,816	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	4	97,065,600
8		BULANGO RAYA	317,468,416	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
9		TANJUNG KARANG	341,734,816	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	4	97,065,600
10		MUTIARA LAUT	317,468,416	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					






NO	KECAMATAN	NAMA DESA	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA										
			Tunjangan Jabatan	Tunjangan Kinerja					Tunjangan Kedudukan BPD				
			Tunjangan Jabatan Kades	KETUA BPD	WAKIL KETUA BPD	SEKRETARIS BPD	JLH ANG BPD	ANGGOTA BPD	KETUA BPD	WAKIL KETUA BPD	SEKRETARIS BPD	ANGGOTA BPD	JLH ANG BPD
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
VII	TOMILITO		180,000,000	46,800,000	42,120,000	42,120,000	20	79,560,000	62,400,000	56,160,000	56,160,000	106,080,000	20
1		DAMBALO	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
2		MILANGO	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
3		JEMBATAN MERAH	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
4		BUBODE	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
5		LEYAO	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
6		MOLANTADU	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
7		HUIDU MELITO	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
8		BULANGO RAYA	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
9		TANJUNG KARANG	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
10		MUTIARA LAUT	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					






NO	KECAMATAN	NAMA DESA	TOTAL SILTAP, TUNJANGAN DAN TUNJANGAN BPD	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			JUMLAH BIAYA OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA	STAF BPD	TOTAL BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (PAGU ADD PER DESA)
				Operasional Pemerintahan Desa					
				Pemerintah Desa	BPD	BIMTEK BPD			
1	2	3	23	24	26	29	28	35	42
VII	TOMILITO		3,098,040,000	50,000,000	40,508,960	36,000,000	126,508,960	120,000,000	3,344,548,960
1		DAMBALO	341,350,320	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	366,001,216
2		MILANGO	292,817,520	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	317,468,416
3		JEMBATAN MERAH	317,083,920	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	341,734,816
4		BUBODE	317,083,920	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	341,734,816
5		LEYAO	292,817,520	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	317,468,416
6		MOLANTADU	317,083,920	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	341,734,816
7		HUIDU MELITO	317,083,920	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	341,734,816
8		BULANGO RAYA	292,817,520	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	317,468,416
9		TANJUNG KARANG	317,083,920	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	341,734,816
10		MUTIARA LAUT	292,817,520	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	317,468,416

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PENDAPATAN TRANSFER						
			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA						
			ADD	Penghasilan Tetap dan Tunjangan					
SILTAP KADES	SEKDES	KAUR		SEKSI	JLH DSN	KADUS			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VIII	PONELO KEP.		1,269,873,664	116,478,720	106,772,160	194,131,200	194,131,200	12	291,196,800
1		PONELO	317,468,416	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
2		MALAMBE	317,468,416	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
3		OTIOLA	317,468,416	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
4		TIHENGGO	317,468,416	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					






NO	KECAMATAN	NAMA DESA	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA										
			Tunjangan Jabatan	Tunjangan Kinerja					Tunjangan Kedudukan BPD				
			Tunjangan Jabatan Kades	KETUA BPD	WAKIL KETUA BPD	SEKRETARIS BPD	JLH ANG BPD	ANGGOTA BPD	KETUA BPD	WAKIL KETUA BPD	SEKRETARIS BPD	ANGGOTA BPD	JLH ANG BPD
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
VIII	PONELO KEP.		72,000,000	18,720,000	16,848,000	16,848,000	8	31,824,000	24,960,000	22,464,000	22,464,000	42,432,000	8
1		PONELO	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
2		MALAMBE	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
3		OTIOLA	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
4		TIHENGO	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					






NO	KECAMATAN	NAMA DESA	TOTAL SILTAP, TUNJANGAN DAN TUNJANGAN BPD	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA				STAF BPD	TOTAL BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (PAGU ADD PER DESA)
				Operasional Pemerintahan Desa			JUMLAH BIAYA OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA		
				Pemerintah Desa	BPD	BIMTEK BPD			
1	2	3	23	24	26	29	28	35	42
VIII	PONELO KEP.		1,171,270,080	20,000,000	16,203,584	14,400,000	50,603,584	48,000,000	1,269,873,664
1		PONELO	292,817,520	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	317,468,416
2		MALAMBE	292,817,520	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	317,468,416
3		OTIOLA	292,817,520	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	317,468,416
4		TIHENGO	292,817,520	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	317,468,416

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati






NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PENDAPATAN TRANSFER ADD	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA					
				Penghasilan Tetap dan Tunjangan					
				SILTAP KADES	SEKDES	KAUR	SEKSI	JLH DSN	KADUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IX	MONANO		3,247,483,392	291,196,800	266,930,400	485,328,000	485,328,000	33	800,791,200
1		MONANO	341,734,816	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	4	97,065,600
2		TUDI	341,734,816	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	4	97,065,600
3		MONAS	341,734,816	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	4	97,065,600
4		DUNU	317,468,416	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
5		GARAPIA	317,468,416	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
6		SOGU	317,468,416	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
7		PILOHULATA	341,734,816	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	4	97,065,600
8		MOKONOWU	317,468,448	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
9		TOLITEHUYU	293,202,016	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	2	48,532,800
10		ZURIYATI	317,468,416	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					






NO	KECAMATAN	NAMA DESA	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA										
			Tunjangan Jabatan	Tunjangan Kinerja					Tunjangan Kedudukan BPD				
			Tunjangan Jabatan Kades	KETUA BPD	WAKIL KETUA BPD	SEKRETARIS BPD	JLH ANG BPD	ANGGOTA BPD	KETUA BPD	WAKIL KETUA BPD	SEKRETARIS BPD	ANGGOTA BPD	JLH ANG BPD
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
IX	MONANO		180,000,000	46,800,000	42,120,000	42,120,000	20	79,560,000	62,400,000	56,160,000	56,160,000	106,080,000	20
1		MONANO	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
2		TUDI	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
3		MONAS	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
4		DUNU	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
5		GARAPIA	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
6		SOGU	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
7		PILOHULATA	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
8		MOKONOWU	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
9		TOLITEHUYU	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
10		ZURIYATI	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	TOTAL SILTAP, TUNJANGAN DAN TUNJANGAN BPD	BIDANG PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DESA			STAF BPD	TOTAL BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (PAGU ADD PER DESA)	
				Operasional Pemerintahan Desa					JUMLAH BIAYA OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA
				Pemerintah Desa	BPD	BIMTEK BPD			
1	2	3	23	24	26	29	28	35	42
IX	MONANO		3,000,974,400	50,000,000	40,508,960	36,000,000	126,508,960	120,000,000	3,247,483,392
1		MONANO	317,083,920	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	341,734,816
2		TUDI	317,083,920	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	341,734,816
3		MONAS	317,083,920	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	341,734,816
4		DUNU	292,817,520	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	317,468,416
5		GARAPIA	292,817,520	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	317,468,416
6		SOGU	292,817,520	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	317,468,416
7		PILOHULATA	317,083,920	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	341,734,816
8		MOKONOWU	292,817,520	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	317,468,448
9		TOLITEHUYU	268,551,120	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	293,202,016
10		ZURIYATI	292,817,520	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	317,468,416

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					






NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PENDAPATAN TRANSFER	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA					
			ADD	Penghasilan Tetap dan Tunjangan					
				SILTAP KADES	SEKDES	KAUR	SEKSI	JLH DSN	KADUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	BIAU		3,174,684,160	291,196,800	266,930,400	485,328,000	485,328,000	30	727,992,000
1		BIAU	317,468,416	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
2		OMUTO	317,468,416	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
3		LUHUTO	317,468,416	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
4		WINDU	317,468,416	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
5		TOPI	317,468,416	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
6		SEMBIHINGAN	317,468,416	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
7		DIDINGGA	317,468,416	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
8		BUALO	317,468,416	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
9		POTANGA	317,468,416	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
10		BOHULO	317,468,416	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					






NO	KECAMATAN	NAMA DESA	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA										
			Tunjangan Jabatan	Tunjangan Kinerja					Tunjangan Kedudukan BPD				
			Tunjangan Jabatan Kades	KETUA BPD	WAKIL KETUA BPD	SEKRETARIS BPD	JLH ANG BPD	ANGGOTA BPD	KETUA BPD	WAKIL KETUA BPD	SEKRETARIS BPD	ANGGOTA BPD	JLH ANG BPD
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
X	BIAU		180,000,000	46,800,000	42,120,000	42,120,000	20	79,560,000	62,400,000	56,160,000	56,160,000	106,080,000	20
1		BIAU	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
2		OMUTO	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
3		LUHUTO	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
4		WINDU	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
5		TOPI	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
6		SEMBIHINGAN	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
7		DIDINGGA	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
8		BUALO	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
9		POTANGA	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
10		BOHULO	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati






NO	KECAMATAN	NAMA DESA	TOTAL SILTAP, TUNJANGAN DAN TUNJANGAN BPD	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			STAF BPD	TOTAL BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (PAGU ADD PER DESA)	
				Operasional Pemerintahan Desa					JUMLAH BIAYA OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA
				Pemerintah Desa	BPD	BIMTEK BPD			
1	2	3	23	24	26	29	28	35	42
X	BIAU		2,928,175,200	50,000,000	40,508,960	36,000,000	126,508,960	120,000,000	3,174,684,160
1		BIAU	292,817,520	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	317,468,416
2		OMUTO	292,817,520	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	317,468,416
3		LUHUTO	292,817,520	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	317,468,416
4		WINDU	292,817,520	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	317,468,416
5		TOPI	292,817,520	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	317,468,416
6		SEMBIHINGAN	292,817,520	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	317,468,416
7		DIDINGGA	292,817,520	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	317,468,416
8		BUALO	292,817,520	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	317,468,416
9		POTANGA	292,817,520	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	317,468,416
10		BOHULO	292,817,520	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	317,468,416

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PENDAPATAN TRANSFER ADD	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA					
				Penghasilan Tetap dan Tunjangan					
				SILTAP KADES	SEKDES	KAUR	SEKSI	JLH DSN	KADUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XI	SUMALATA TIMUR		3,174,684,160	291,196,800	266,930,400	485,328,000	485,328,000	30	727,992,000
1		DEME SATU	317,468,416	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
2		BULUWATU	317,468,416	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
3		DULUKAPA	317,468,416	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
4		DEME DUA	317,468,416	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
5		BULADU	317,468,416	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
6		HULAWA	317,468,416	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
7		WUBUDU	317,468,416	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
8		BUBALANGO	317,468,416	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
9		MOTIHELUMO	317,468,416	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
10		KOLLIWOKA	317,468,416	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
TOTAL			41,000,000,000	3,581,720,640	3,283,243,920	5,969,534,400	5,969,534,400	441	10,701,482,400

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA										
			Tunjangan Jabatan	Tunjangan Kinerja					Tunjangan Kedudukan BPD				
			Tunjangan Jabatan Kades	KETUA BPD	WAKIL KETUA BPD	SEKRETARIS BPD	JLH ANG BPD	ANGGOTA BPD	KETUA BPD	WAKIL KETUA BPD	SEKRETARIS BPD	ANGGOTA BPD	JLH ANG BPD
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
XI	SUMALATA TIMUR		180,000,000	46,800,000	42,120,000	42,120,000	20	79,560,000	62,400,000	56,160,000	56,160,000	106,080,000	20
1		DEME SATU	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
2		BULUWATU	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
3		DULUKAPA	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
4		DEME DUA	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
5		BULADU	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
6		HULAWA	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
7		WUBUDU	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
8		BUBALANGO	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
9		MOTIHELUMO	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
10		KOLLUWOKA	18,000,000	4,680,000	4,212,000	4,212,000	2	7,956,000	6,240,000	5,616,000	5,616,000	10,608,000	2
TOTAL			2,214,000,000	575,640,000	518,076,000	518,076,000	268	1,066,104,000	767,520,000	690,768,000	690,768,000	1,421,472,000	268

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	TOTAL SILTAP, TUNJANGAN DAN TUNJANGAN BPD	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			STAF BPD	TOTAL BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (PAGU ADD PER DESA)	
				Operasional Pemerintahan Desa					JUMLAH BIAYA OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA
				Pemerintah Desa	BPD	BIMTEK BPD			
1	2	3	23	24	26	29	28	35	42
XI	SUMALATA TIMUR		2,928,175,200	50,000,000	40,508,960	36,000,000	126,508,960	120,000,000	3,174,684,160
1		DEME SATU	292,817,520	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	317,468,416
2		BULUWATU	292,817,520	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	317,468,416
3		DULUKAPA	292,817,520	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	317,468,416
4		DEME DUA	292,817,520	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	317,468,416
5		BULADU	292,817,520	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	317,468,416
6		HULAWA	292,817,520	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	317,468,416
7		WUBUDU	292,817,520	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	317,468,416
8		BUBALANGO	292,817,520	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	317,468,416
9		MOTIHELUMO	292,817,520	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	317,468,416
10		KOLUWOKA	292,817,520	5,000,000	4,050,896	3,600,000	12,650,896	12,000,000	317,468,416
TOTAL			37,967,939,760	615,000,000	498,260,208	442,800,000	1,556,060,208	1,476,000,000	41,000,000,000

BUPATI GORONTALO UTARA

THARIQ MODANGGU

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

LEMBAR DISPOSISI

SURAT DARI : DPMD	DITERIMA : 28 NOV 2022
NOMOR SURAT : 140/DPMD/261/XI/2022	NOMOR AGENDA : 2044
TGL SURAT : 24 NOV 2022	SIFAT SURAT :

MATERI SURAT :

* Telaahan stat *

Permohonan penorbihan peraturan Bupati Gorontalo utara tentang
tata cara pengalokasian dan penggunaan alokasi dana desa
tahun anggaran 2023

DITERUSKAN KEPADA YTH, Sdr.	POKOK DISPOSISI
<input type="checkbox"/> 1. WAKIL BUPATI	<input checked="" type="checkbox"/> Proses Sesuai Ketentuan Perundangan
<input checked="" type="checkbox"/> 2. SEKRETARIS DAERAH	<input type="checkbox"/> Telaah / Beri Penjelasan / Saran
<input type="checkbox"/> 3. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<input type="checkbox"/> Proses Lebih Lanjut
<input type="checkbox"/> 4. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	<input type="checkbox"/> Bicarakan / Lap. Bupati / Laksanakan
<input type="checkbox"/> 5. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	<input type="checkbox"/> ACC / Buat Tanggapan / Jawab
<input type="checkbox"/> 6. STAF AHLI	<input type="checkbox"/> Koreksi / Sempurnakan
<input type="checkbox"/> 7. BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	<input checked="" type="checkbox"/> Koordinasikan / konfirmasi
<input type="checkbox"/> 8. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<input type="checkbox"/> Pantau
<input type="checkbox"/> 9. BAGIAN HUKUM	<input type="checkbox"/> UMP (Untuk Menjadi Perhatian)
<input type="checkbox"/> 10. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	<input type="checkbox"/> Fall (Simpan)
<input type="checkbox"/> 11. BAGIAN PEMBANGUNAN	<input type="checkbox"/> Arsip
<input type="checkbox"/> 12. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
<input type="checkbox"/> 13. BAGIAN ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI	
<input type="checkbox"/> 14. BAGIAN PROTOKOLER & HUBUNGAN MASYARAKAT	
<input type="checkbox"/> 15. BAGIAN UMUM	

DISPOSISI I

28/11-22

DISPOSISI II

Yth. Kadis Pmdes

- proses sesuai dgn ketentuan yg berlaku

- koordinasi

DISPOSISI III

30/11-22



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jln. Kusnodanupoyo Kompleks Blokplan Perkantoran Desa Molingkapato Kec. Kwandang Kode Pos 96252

TELAAHAN STAF

Permohonan Penerbitan Peraturan Bupati Gorontalo Utara Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023

Kepada Yth : Bupati Gorontalo Utara
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Nomor : 140 / DpMD / 261 / XI / 2022
Tanggal : 24 November 2022

I. Persoalan :

- a. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

II. Pra Anggaran :

1. bahwa dalam rangka kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa;
2. bahwa penerbitan Peraturan Bupati dimaksud untuk lebih menjelaskan tentang tata cara pengalokasian dan penggunaan alokasi dana desa tahun anggaran 2023.

III. Fakta yang Mempengaruhi :

1. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Desa;
2. bahwa dalam rangka upaya sinkronisasi berbagai macam program dan kegiatan di desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. bahwa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan sesuai kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

IV. Analisis :

1. Alokasi Dana Desa diperuntukkan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, untuk tujuan pembangunan berkelanjutan;
2. Penggunaan Alokasi Dana Desa lebih ditekankan pada program dan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

V. Kesimpulan :

1. Penggunaan Alokasi Dana Desa merupakan acuan bagi desa untuk melaksanakan program kegiatan berdasarkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, khususnya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan;
2. Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabel pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

VI. Saran :

Dalam rangka memaksimalkan pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa, maka dengan ini dimohon kepada Bupati Gorontalo Utara untuk menerbitkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023.

Demikian Telahan staf ini dibuat untuk beroleh persetujuan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Pt. KEPALA DINAS

ABDULWAHAB PAUDI, S.IP. M.AP

Nip. 19670822 199203 1 002